

# **PENGARUH INTEREST GROUP TERHADAP KEBIJAKAN BRITANIA RAYA TERKAIT BREXIT**

**Koko Catra Febrian  
Farah Wahyu Oktariani  
Rahmat Reski Agus  
Rahmatya Nur Wibi Pertiwi**

*Program Studi Hubungan Internasional  
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur*

e-mail: [koocatra@gmail.com](mailto:koocatra@gmail.com)  
e-mail: [faraoktariani@gmail.com](mailto:faraoktariani@gmail.com)  
e-mail: [rahmatreskia@gmail.com](mailto:rahmatreskia@gmail.com)  
e-mail: [rahmatya160397@gmail.com](mailto:rahmatya160397@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*In a democratic country, like the United Kingdom, has a political party that supports and rejects foreign policy. Competition of political parties in the United Kingdom forced the public to express their aspirations regarding the BREXIT policy. The pro-party against such conservative and conservative referendums like the workers' party makes two camps in Great Britain. Pro's against the referendum is called VOTE LEAVE and the camp is called VOTE REMAIN. The presence of both camps and interest groups has forced the Great Britain to be forced to exercise their right to vote again. The public is demanded in a condition of choosing that Great Britain out or remain a member of the European Union. In accordance with the final result of the referendum, the VOTE LEAVE stronghold won the most votes, the United Kingdom de jure out of the European Union. Along with the incident, David Cameron resigned and was replaced by Theresa May. Theresa May signed Article 50 as a legality that the United Kingdom was out of EU membership.*

**Keywords:** *Brexit, Vote Leave, Vote Remain, domestic politics*

*Pada negara demokrasi seperti Britania Raya memiliki partai politik yang mendukung dan menolak kebijakan luar negeri. Persaingan partai politik di Britania Raya memaksa masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya terkait kebijakan BREXIT. Partai yang pro terhadap referendum seperti konservatif dan kontra seperti partai buruh membuat dua kubu di Britania Raya. Kubu pro terhadap referendum dinamakan VOTE LEAVE dan kubu dinamakan VOTE REMAIN. Kehadiran kedua kubu dan kelompok kepentingan membuat masyarakat Britania Raya dipaksa untuk menggunakan hak pilihnya kembali. Masyarakat dituntut pada sebuah kondisi memilih agar Britania Raya keluar atau tetap menjadi anggota Uni Eropa. Sesuai dengan hasil akhir referendum, kubu VOTE LEAVE memenangkan suara terbanyak, Britania Raya secara de jure keluar dari Uni Eropa. Beriringan dengan peristiwa tersebut, David Cameron mengundurkan diri dan digantikan oleh Theresa May. Theresa May menandatangani Article 50 sebagai legalitas bahwa Britania Raya keluar dari keanggotaan Uni Eropa.*

**Kata Kunci:** *Brexit, Vote Leave, Vote Remain, politik domestik*

## **Latar Belakang**

Britain Exit (Brexit) merupakan fenomena bersejarah bagi masyarakat Britania Raya yang menginginkan negaranya untuk meninggalkan Uni Eropa, yang pelaksanaannya dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron (Iyengar 2016). Keinginan ini didasari oleh asumsi sebagian kelompok masyarakat Britania Raya yang merasa bahwa Uni Eropa telah melanggar kedaulatan Britania Raya dalam berbagai aspek yang semakin hari semakin mengontrol kehidupan sehari-hari Britania Raya. Karena Britania Raya merasa terbebani oleh regulasi Uni Eropa yang dinilai telah membuat peraturan dan banyak membatasi bisnis di Britania Raya serta prinsip yang diterapkan oleh Uni Eropa mengenai “*Free Movement of People*” telah membawa banyak imigran datang ke Britania Raya, sehingga memicu berbagai permasalahan seperti persaingan tenaga kerja yang menghilangkan kesempatan masyarakat Britania Raya untuk dapat bekerja di negaranya sendiri, sosial budaya dan juga gangguan keamanan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah imigran di Britania Raya. Uni Eropa dinilai telah melakukan intervensi dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Britania Raya. Dengan adanya kebijakan Brexit ini, diharapkan Britania Raya bisa berdiri sendiri. (Horan 2016).

Pada 23 Juni 2016, Britania Raya melakukan referendum pemungutan suara Brexit yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat Britania Raya untuk memutuskan apakah harus keluar dari Uni Eropa atau tetap berada di Uni Eropa. (huffingtonpost.com 2016) Hal ini kemudian memicu masyarakat Britania Raya membentuk 2 blok yaitu *blok Vote Remain* dan *blok Vote Leave* (Erlanger 2016). Masyarakat yang tergabung dalam *blok Vote Remain* ini adalah masyarakat yang menolak Britania Raya keluar dari Uni Eropa yang didominasi oleh Partai Buruh di Britania Raya. Masyarakat yang mendukung *Vote Remain* tersebut menginginkan Britania Raya untuk tetap berada di Uni Eropa karena warga Britania Raya merasa mendapat banyak manfaat dari Uni Eropa. Salah satunya yaitu lebih mudah melakukan perdagangan dan mempermudah mencari pekerjaan karena migrasi dari satu negara ke negara lain lebih mudah tanpa adanya visa.

Sedangkan kubu oposisi yaitu *Vote Leave* mendukung keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Hal ini dikarenakan bagi kubu *Vote Leave*, Uni Eropa hanya membuat Britania Raya penuh dengan imigran sehingga para pekerja lokal di Britania Raya harus bersaing dalam tenaga kerja dengan warga Eropa lainnya sehingga tidak jarang masyarakat Britania Raya pada akhirnya kehilangan peluang untuk dapat bekerja di wilayahnya. Selain itu, kubu *Vote Leave* merasa terbebani dengan anggaran wajib keanggotaan Uni Eropa yang mana Britania Raya telah berkontribusi sekitar £13 billion atau setara dengan \$19 billion per tahun. Anggaran yang begitu besar membuat kubu *Vote Leave* berpendapat bahwa akan lebih baik apabila jumlah nominal uang tersebut digunakan untuk keperluan Britania Raya sendiri (Lee 2016).

Selain itu, menurut David Cameron, Britania Raya juga dianggap aman apabila bersama 27 anggota negara lainnya dibanding berdiri sendiri. Apabila meninggalkan Uni Eropa maka Britania Raya akan dihadapkan banyak masalah selain perekonomian yaitu masalah *security* (telegraph.co.uk 2016). Bahkan organisasi internasional seperti IMF pun mengatakan bahwa apabila Britania

Raya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, maka konsekuensinya adalah negosiasi dengan Uni Eropa akan memberikan dampak yang signifikan seperti penanaman modal dan menimbulkan gejolak di pasar moneter yang akan merusak perdagangan bilateral dan transaksi keuangan dengan Uni Eropa serta membatasi kerjasama ekonomi dan manfaat integrasi dari hubungan kerjasama Uni Eropa dan Britania Raya itu sendiri (IMF 2016).

Dengan adanya kubu Vote Remain dan Vote Leave di Britania Raya ini jelas memberikan pengaruh yang besar dalam kebijakan Britania Raya terkait Brexit. Jurnal ini akan menjelaskan “Bagaimana pengaruh Interest Group terhadap kebijakan Britania Raya terkait dengan keputusannya keluar dari keanggotaan Uni Eropa”.

### **Level of Analisis: Politik Domestik**

Hampir semua negara-negara didunia menganggap politik domestik merupakan salah satu variabel yang memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri. Level analisis politik domestik ini memiliki keterkaitan dengan aktor yang ada di institusi politik domestik. Hal ini dikarenakan peran yang dianggap penting, meliputi dari elemen struktural yang ada pada jalur birokrasi pemerintahan, tingkat perbedaan perspektif antar aktor domestik, rezim pemerintahan, dan tingkat kontribusi aktor didalamnya. Politik domestik juga menyatakan bahwa salah satu komponen yang juga dipertimbangkan adalah kelompok-kelompok kepentingannya (Breuning 2007).

Sesuai dengan Breuning (2007) umumnya pemerintahan yang demokrasi, masyarakatnya memiliki banyak kesempatan untuk mengutarakan aspirasinya dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Keterlibatan langsung ini akan mempengaruhi para *decision maker* di negara tersebut. Kebijakan ini bersifat *bottom-up* yaitu masyarakat secara langsung memiliki dampak khusus terhadap proses pembuat kebijakan luar negeri. Hasilnya para *decision maker* atau kelompok elit senantiasa mengikuti pandangan mayoritas masyarakat. Umumnya struktur negara demokrasi memiliki institusi politik yang bersifat lebih terbuka sehingga membuka akses yang besar pada kelompok kepentingan yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri sebuah negara umumnya merupakan hasil dari pertimbangan dalam negeri. Pertimbangan-pertimbangan ini merupakan diskusi dan penggodokan politik domestik. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian digunakan penstudi relasi antar negara dan penulis dalam menganalisis kebijakan melalui kacamata politik domestik. Pada negara demokratis umumnya politik dalam negeri menitik beratkan pada pemerintah untuk merespon oposisi politik didalam pembuatan kebijakan luar negeri sebuah negara (Doeser 2011). Politik domestik menganalisis pemerintah dalam upaya pencapaian kepentingan nasional meskipun pada kondisi yang terbatas dan terdesak (Putnam 1998, dalam Doeser 2011).

Kebijakan luar negeri dalam konteks politik domestik merupakan usaha dalam mempertahankan kekuatan politiknya. Dalam kondisi ini para pemimpin politik termasuk partai mempertahankan kekuatan dan posisi politiknya. Keharusan memperatahkan kekuatan politik tersebut jika perlu ditambahkan dengan pencarian dukungan politik atau koalisi partai (Hagan 1993, dalam Doeser

2011). Kebijakan luar negeri yang diubah terjadi akibat pemimpin politik mencari cara guna menaikkan kekuatan politik untuk mengatasi masalah. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah domestik yang membawa hasil untuk mengubah kebijakan luar negeri demi kepentingan negara (Knopf 1998, dalam Doeser 2011).

Pengubahan kebijakan luar negeri juga memberikan dampak pada partai-partai politik yang menjadi oposisi pemerintah. Partai politik yang menjadi oposisi pemerintah memiliki indikator untuk membuat kebijakan luar negeri saling tarik ulur. Pertama, kekuatannya untuk membuat koalisi. Kedua, intensitas kegiatan untuk melakukan oposisi seperti kampanye dan propaganda. Kekuatan oposisi partai adalah pengaruhnya dikursi pemerintahan (Hagan 1993, dalam Doeser 2001). Jumlah anggota partai oposisi yang duduk dikursi pemerintahan dapat mempengaruhi dan mengontrol pemerintah atas proses kebijakan. Partai oposisi mampu mempertahankan kekuatannya dengan dukungan publik ketika banyak suara yang mendukung mereka (Hagan 1993, dalam Doeser 2011).

Intensitas oposisi partai adalah tindakan-tindakan yang terealisasikan untuk menentang pemerintah. Umumnya partai oposisi akan melawan program-program pemerintah untuk kelanjutan masa jabatan pemerintah yang terpilih saat itu (Hagan 1993, dalam Doeser 2011). Politik domestik akan mengalami pergolakan dalam kebijakan luar negerinya jika melalui beberapa fase. Pertama, dukungan yang kuat antar pendukung kebijakan dan penolak kebijakan. Kedua, partai politik oposisi mampu menjadi penghalang untuk mengubah ke kebijakan yang baru. Terdapat *term* tambahan yakni jika partai oposisi tidak terlalu kuat maka umumnya menggunakan tokoh yang berpengaruh dari partai politik tersebut (Kliestra dan Mayer 2001, dalam Doeser 2011).

Disetiap negara dunia, keberadaan suatu politik domestik dapat dikatakan sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Level analisis politik domestik ini memiliki keterkaitan dengan aktor yang ada di institusi politik domestik karena peranannya yang dianggap penting, mulai dari elemen struktural yang ada pada jalur birokrasi pemerintahan, tingkat perbedaan perspektif antar aktor domestik dengan rezim pemerintahan, dan tingkat kontribusi aktor dalam suatu politik luar negeri. Dalam melihat politik domestik suatu negara dapat menganalisis tekanan-tekanan melalui kelompok kepentingan, media dan opini publik. Hubungan para *decision maker* dan konstituen politik domestik dibentuk dalam institusi politik sebuah negara.

Pemerintahan yang bersifat otoriter akan memberikan sedikit kesempatan kepada warga negaranya untuk secara eksplisit dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa publik tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat. Opini publik tetap membawa pengaruh secara tidak langsung yang sifatnya tersirat dan peranannya sangat kecil. *Decision maker* dalam pemerintahan yang bersifat otoriter biasanya hanya menghadapi sedikit tekanan domestik dikarenakan masyarakatnya tidak dapat bergabung pada kelompok kepentingan dan sulit bagi masyarakat untuk membentuk opini publik serta sulitnya kebebasan pers. Sehingga kebijakan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah bersifat *top-down* yaitu kebijakan yang dibuat dan diputuskan oleh kelompok elit adalah representasi dari kepentingan nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negaranya.

Sedangkan pada pemerintahan demokrasi, masyarakat memiliki banyak kesempatan untuk mengutarakan aspirasinya dan turut serta dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang secara langsung akan mempengaruhi para *decision maker* di negara tersebut. Kebijakan ini bersifat *bottom-up* yaitu masyarakat secara langsung memiliki dampak khusus terhadap proses pembuat kebijakan luar negeri sehingga para *decision maker* atau kelompok elit senantiasa mendengarkan opini publik. Secara struktur, negara demokrasi memiliki institusi politik yang bersifat lebih terbuka sehingga pada akhirnya membuka akses yang besar pada kelompok kepentingan yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Karena pembuat kebijakan luar negeri selalu menghubungkan antara domestik dan internasional. Dalam sebuah rezim juga diperhitungkan dalam suatu politik domestik yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dan ketika partai konservatif yang berkuasa diparlemen dan ada sebuah janji dari pemimpin partai konservatif yaitu akan membuat suatu referendum Britania Raya untuk keluarnya dari Uni Eropa. Dan ini bisa menegaskan keadaan politiknya ketika rezim yang berkuasa (Breuning 2011).

### **Gabungan Partai Yang Ada di Britania Raya**

*Vote Leave* diinisiasi pada akhir tahun 2015 sebagai upaya Britania Raya untuk memilih meninggalkan Uni Eropa. *Vote Leave* dibentuk oleh orang-orang yang merasa bahwa Britania Raya tetap bergabung dengan Uni Eropa akan menciptakan berbagai kerugian di masa mendatang. *Vote Leave* digagas oleh berbagai partai di Britania Raya yang mampu dikatakan memiliki *power* di pemerintahan Britania Raya. Salah satu partai tersebut adalah partai konservatif Britania Raya yang menuntut kebebasan dari Uni Eropa. Namun tidak hanya partai konservatif, terdapat pula partai buruh dan partai independen Britania Raya yang nyatanya turut andil dalam *vote leave*.

Kondisi yang perlu digaris bawahi dalam *vote leave* yakni keaktifan partai buruh yang umumnya mendukung Britania Raya agar tidak meninggalkan Uni Eropa. Biasanya buruh memilih Britania Raya tetap di Uni Eropa karena banyaknya kesempatan bekerja di negara-negara anggota Uni Eropa. Gisela Stuart merupakan salah satu tokoh partai buruh yang aktif melakukan propaganda terkait referendum Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Gisela Stuart melakukan propaganda aktif dari berbagai bagian wilayah di Britania Raya. Dalam salah satu pernyataannya Gisela Stuart menyatakan bahwa lebih dari £200 juta dikeluarkan oleh Britania Raya untuk Uni Eropa (news.sky.com 2016).

### **Pebisnis Yang Mendukung *Vote Leave***

Dana propaganda *vote leave* merupakan hasil sumbangan dari partai konservatif dan partai buruh. Partai konservatif, Tory Peter Cruddas mendukung dana propaganda *vote leave*. Tory Peter Cruddas ini merupakan dimisioner bendahara partai konservatif yang menjabat pada tahun 2011. Dari partai buruh John Mills juga turut andil dalam pendanaan propaganda kubu *vote leave*. John Mills merupakan pebisnis yang juga mengajak Stuart Wheeler memberikandana propaganda. Pendanaan ini diharapkan mampu mendongkrak finansial *vote leave* untuk mendapatkan respon masyarakat Britania Raya agar memilih keluar dari Uni Eropa (theguardian.com 2015).

*Power* partai konservatif dan pebisnis mampu juga membawa mantan sekretaris lingkungan untuk menarik jajaran parlemen. Mantan sekretaris lingkungan tersebut adalah Owen Paterson yang mengajak anggota parlemen Britania Raya mendukung *vote leave*. John Mills yang merupakan pemilik perusahaan Mr Mills menyatakan *statement*-nya. *Statement* tersebut ialah memilih meninggalkan Uni Eropa sama halnya mengundang pasar bebas yang lebih besar kepada Britania Raya. Britania Raya juga mendapatkan kerjasama lebih mudah dan mampu mengontrol hukumnya secara mandiri. John Mills mendedikasikan dirinya untuk mendorong semua warga berada di *vote leave* (theguardian.com 2015).

*Vote leave* mendapat dukungan dari tokoh lain selain pebisnis yang membantu menyebarkan pandangan kubu *leave*. Tokoh tersebut Frederick Forsyth selaku penulis yang terkenal di Britania Raya. Tokoh lain seperti Andrew Roberts yakni sejarawan Britania Raya. Dan tokoh Lord Trimble yakni orang Britania Raya yang mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. *Vote Leave* juga mendapatkan koalisi beberapa partai tambahan diantaranya *Business for Britain*, *Labour Leave*, dan *Conservatives for Britain*. Salah satu tokoh *Labour Leave* yakni Kate Hoey menyatakan *statement*-nya yang merupakan tantangan. Tantangan tersebut untuk masyarakat Britania Raya di seluruh wilayah Britania Raya yang ingin merampas kendali negara Britania Raya yang hilang (theguardian.com 2015).

Kubu *vote leave* mendapatkan dana dari pebisnis lain yang turut membantu pendanaan propaganda. Pengusaha tersebut seperti John Caudwell dari Phones4U, Michael Freeman dari *Argent Group*. Pebisnis lain juga mendukung seperti Oliver Hemsley dari *Numis Corporation* dan Alexander Hoare dari bank swasta C. Hoare & Co. Salah satu pebisnis bernama Richard Tice pemilik *real estate group* CLS Holdings menyampaikan *statement*-nya. *Statement* tersebut merupakan harapan bahwa kegiatan *vote leave* dapat membujuk semua pebisnis di seluruh Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Richard Tice menyatakan rekan-rekannya akan mendorong semua kelompok *leave* berbagai entitas politik yang membantu pencapaian suara agar keluar dari Uni Eropa (theguardian.com 2015).

Kate Hoey dari partai *Labour Leave* menyatakan Britania Raya harus memberhentikan supremasi hukum atas Uni Eropa. Kate Hoey menyatakan pernyataan tersebut bersamaan dengan peluncuran logo dari *vote leave* (lihat gambar 1.). Pernyataan ini menarik perhatian Crispin Odey pengusaha Odey Asset Management untuk masuk ke kubu *leave*. *Vote leave* memiliki pandangan bahwa mantan perdana menteri David Cameron akan gagal mendiskusikan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Anggapan inilah yang membuat David

Cameron semakin tersudut dan terpojok. *Vote leave* juga berasumsi bahwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menghasilkan suara independen dari Organisasi Perdagangan Dunia dengan dasar *friendly cooperation*. Dasar kerjasama tersebut akan membawa Britania Raya pada promosi kerjasama perdagangan yang lebih luas (reuters.com 2015).

*Vote leave* mendapatkan bantuan pula dari Martin Bellamy pemilik Salamanca Group dan John Longworth mantan direktur *British Chambers of Commerce*. *Vote leave* semakin menguat dengan masuknya Suzanne Elisabeth Evans dari partai *UK Independence Party* (UKIP). Masuknya Suzanne Evans diikuti Nigel Dodds yang merupakan pimpinan partai Pesatuan Demokrtaik (*Democratic Unionist*). Douglas Carswell dan Nigel Farage dari partai UKIP menyatakan *statement* pada aksinya mencari massa. Douglas Carswell dan Nigel Farage menyatakan antara *vote leave* dan *vote remain* hanyalah akan membantu menaikkan pengaruh *vote leave* semakin besar. Pernyataan ini muncul ketika *vote leave* dipilih *Electoral Commission* sebagai tim propaganda resmi (bbc.com 2016).

*Vote leave* selain dibantu oleh John Mills, juga dibantu oleh rekan John Mills yakni Ed Miliband. Ed Miliband merupakan anggota partai oposisi Britania Raya dan termasuk partai buruh. Partai oposisi Britania Raya atau yang sering disebut *Leader of Opposition* merupakan partai yang sangat getol menentang kebijakan Britania Raya. Ed Miliband juga seorang pebisnis yang bergerak bersama di John Mills Limited Corp. Ed Miliband menyatakan pernyataannya untuk mendukung partai konservatif. Ed Miliband menyatakan bahwa sebagian besar warga Britania Raya memilih partai konservatif karena sangat ramah terhadap pajak. Pajak yang ramah bagi pebisnis seperti Ed Miliband merupakan lahan subur untuk mengembangkan bisnisnya di John Mills Limited Corp. (telegraph.co.uk 2013).

Kubu Leave sendiri terlihat sesumbar karena mendapatkan dukungan dari sekitar 250 pebisnis di Britania Raya. Bahkan mantan CEO HSBC yakni Michael Geoghegan, pemilik Better Capital LPP John Moulton, pendiri Carphone Warehouse Group Plc yakni David Rose dan juga pemilik JD Wetherspoon, Tim Martin pun juga dicatut oleh *vote leave* sebagai bagian dari pendukung Brexit. Menurut CEO *Vote Leave* sendiri yakni Matthew Elliott, dukungan dari 250 pebisnis ini akan semakin menegaskan bahwa Brexit memiliki potensi yang baik bagi perusahaan multinasional besar ataupun usaha kecil.

### **Kanselir Pemerintahan Yang Mendukung *Vote Leave***

Kampanye agar Britania Raya keluar dari Uni Eropa yang dilakukan oleh *Vote Leave* semakin menguat (kompas.com 2016). Selain didukung oleh pimpinan bisnis, *Vote Leave* ini juga sepenuhnya didukung oleh Mantan Walikota salah satunya Lord Nigel Lawson. Lord Lawson telah diumumkan menjadi ketua *Vote Leave* yang baru ketika dua tokoh dalam dewan dikeluarkan atau diturunkan dari jabatannya yakni Matthew Elliot dan Dominic Cummings sebagai direktur eksekutif dan direktur kampanye (telegraph.co.uk 2016). Mantan Kanselir Konservatif ini memimpin kampanye *Vote Leave*, menjelang referendum yang menentukan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Dia bersedia menjadi Ketua *Vote Leave* supaya bisa memastikan bahwa organisasi tersebut sepenuhnya siap untuk memulai kampanye referendum (news.sky.com 2016).

Lord Lawson yakin bahwa begitu Perdana Menteri kembali dari Dewan Eropa, pasti tokoh senior lainnya akan mendukung kampanye *Vote Leave* dan Lord Lawson ini juga bersedia membantu Dewan dan Tim kampanye dalam membuat keputusan yang tepat. Salah satu pebisnis yang mendukung *vote leave* yakni John Mills, akan menjadi wakil ketua yang akan mendampingi Lord Lawson. Mills ini berfokus pada pekerjaan kelompok buruh yang memilih *centre-left* (news.sky.com 2016).

Mills mengatakan bahwa kampanye tersebut akan membutuhkan beberapa keputusan yang krusial mengenai cara bekerjasama dengan kelompok lain yang mendukung *vote leave*, bagaimana cara kita melibatkan perwakilan dari seluruh spektrum politik dan bagaimana kita bisa menyajikan pandangan yang positif tentang kehidupan di luar Uni Eropa supaya pemilih bisa membuat keputusan pada hari pemilihan atau referendum. Mills juga akan bekerjasama dengan kelompok kampanye lainnya seperti *Labour Leave* (news.sky.com 2016).

Sementara itu Boris Johnson juga ikut mendukung Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Boris Johnson sendiri adalah seorang politisi konservatif terkemuka. Boris ini awalnya menjabat sebagai Walikota London selama dua periode dan juga memainkan peran utama dalam kampanye *Vote Leave* pada referendum Uni Eropa dan juga menjabat sebagai Sekertaris Luar Negeri. Karena dikenal sebagai politisi konservatif terkemuka dan juga dengan pendekatan eksentriknya terhadap kehidupan, Boris ini disebut sebagai calon pemimpin partai Konservatif di masa depan (Biografi Daring, NY). Selain itu juga *Vote Leave* sendiri didukung oleh mayoritas anggota parlemen konservatif termasuk para menteri seperti Michael Gove, John Whittingdale, Theresa Villers, Priti Patel dan Chris Grayling (express.co.uk 2016).

### **Partai Buruh dan Kabinet Bayangan**

Partai buruh di Britania Raya adalah sebuah partai sayap kiri-tengah yang besar dan para politisnya masuk kedalam kementerian dari Britania Raya. Dan terus memantau sebuah kebijakan yang dibuat oleh Britania Raya dan partai buruh ini membuat suatu prestasi saat berada dalam parlemen dengan membuat pengesahan UU pendidikan (news.okezone.com 2016), tenaga kerja dan jaminan sosial. Partai buruh di Britania Raya mempunyai lawan politik yaitu partai



konservatif yang bertolak belakang dengan partai buruh. Dilihat dari sebuah kebijakan terbaru Britania Raya dalam memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa.

Masuk kedalam parlemen Britania Raya yakni adanya sebuah sistem yang memantau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang melihat adanya sebuah kabinet bayangan. Kabinet bayangan sebagai oposisi dari kabinet pemerintahan untuk menanyakan soal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengajukan kabinet alternatif. Di Britania Raya kabinet bayangan ini berasal dari partai buruh, karena pemerintahan atau parlemennya dikuasai oleh partai konservatif. Dan ini mempunyai pengaruh dalam segi pemerintahan sebagai pihak oposisi untuk mempengaruhi masyarakat, karena kebijakan suatu negara adalah untuk memenuhi kepentingan dari masyarakat.

Sebuah kebijakan Britania Raya akan dipengaruhi oleh keadaan domestik. Dilihat dari kebijakan yang terbaru dengan adanya Brexit yang memunculkan sebuah perdebatan diantara parlemen, partai ataupun masyarakat yang ada di Britania Raya. Dan para tokoh politikus disini juga terus memperdebatkan tentang Brexit ini. Sebuah referendum yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan mengenai keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan disini ada juga kubu oposisi yang menginginkan amandemen dalam sebuah kebijakan Brexit ini. Partai yang menjadi kubu oposisi disini adalah partai buruh dan peran dalam pemerintahan cukup memberikan dampak karena Britania Raya disini adanya sistem parlemen yang memiliki kabinet bayangan. Kabinet bayangan adalah kelompok senior anggota oposisi parlemen bertugas mengkritik kebijakan pemerintah, masing-masing diberikan portofolio tertentu yang bertindak sebagai juru bicara.

Melihat dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Britania Raya mengenai Brexit, maka dilakukanlah voting apakah Britania Raya tetap memutuskan berada di Uni Eropa atau keluar. Dan ini adalah pertarungan dari partai konservatif dan partai buruh. Partai buruh menginginkan tetap berada di Uni Eropa, dikarenakan menurut pandangan, Brexit akan memicu gejolak ekonomi dan menciptakan lubang hitam besar di keuangan publik dan pemerintahan Tory, sebutan untuk pendukung partai konservatif yang tak adil akan membuat keluarga biasa menanggung akibatnya melalui pemangkasan lebih lanjut dan kenaikan pajak (beritasatu.com2016). Dengan demikian pemerintahan terus diguncangkan mengenai Brexit ini dan kubu ini berargumen mengenai masa depan Britania Raya. Dilihat dari segi presentasi partai buruh ini mencapai 61% untuk tetap berada di Uni Eropa.

### **Politikus Remain Britania Raya di Uni Eropa**

Sebagai ketua partai buruh, Jeremy Corbyn mendukung Britania Raya untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa sebagai bentuk dukungan bagi para tenaga kerja. Dengan demikian Britania Raya mendapatkan 20% dari investasi asing untuk meningkatkan perekonomiannya. Ketika memisahkan diri dari Uni Eropa, maka konsekuensinya adalah para investor asing akan keluar dari Britania Raya sehingga membuat Britania Raya berdiri sendiri tanpa mendapatkan supply dana dari investor asing.

Kubu *remain* terus melakukan upaya mempengaruhi masyarakat agar memilih *vote remain* dengan cara melakukan kampanye lintas partai yang dikenal sebagai

*Britain Stronger in Europe*. Apabila Britania Raya tetap menjadi anggota Uni Eropa, maka rakyat Britania Raya akan hidup dengan baik dan mendapatkan hak khusus dari Uni Eropa. Seharusnya hal tersebut ini dimaksimalkan dengan baik oleh Britania Raya. Walikota London, Sadiq Khan yang memiliki kesamaan latar belakang dari partai buruh mendukung kubu *remain*. Dalam sebuah perdebatannya dengan Boris Johnson, Sadiq Khan berargumen bahwa kampanye yang dilakukan oleh kubu Leave hanya berfokus pada isu ekonomi dan kekhawatiran soal imigran. Khan merasa bahwa kubu Leave merasa keberatan dengan kehadiran imigran. Walikota London itu mengatakan bahwa rakyat Britania Raya harus membuat keputusan yang berpengaruh terhadap generasi selanjutnya (dw.com 2016).

Alan Johnson, politikus partai buruh Britania Raya yang juga mantan *Home Secretary Britain* dalam kampanyenya berpendapat bahwa adanya peristiwa serangan teroris di Paris pada November 2016 dapat ditarik sebuah pelajaran, untuk mengatasi terorisme, Britania Raya harus saling bahu-membahu dengan sekutu Eropa. Keamanan Britania Raya sangat berkaitan erat dengan Eropa. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam kubu *Vote Remain* adalah (1) Lord Rose, *Former Chair of Marks & Spencer*, (2) Will Straw, anak dari *Jack Straw* yaitu *Former Labour Home Secretary* dan *former head of the National Union of Students* (3) Alan Johnson (4) Brendan Barber, *former TUC Boss*, dan lain-lain.

### Pendukung Untuk *Remain*

Masyarakat yang mendukung *Vote Remain* berjuang supaya Britania Raya tetap berada di Uni Eropa dengan mengadakan sebuah slogan dalam kampanye Pro-Uni Eropa yang bernama "*Britain Stronger in Europe*". Kampanye *Britain Stronger in Europe* ini diluncurkan oleh Lord Stuart Rose yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memilih untuk tetap berada di Uni Eropa dan memberikan informasi mengenai manfaat apabila yang dirasakan Britania Raya di Uni Eropa. Kampanye ini didukung oleh sejumlah tokoh seperti Sir John Major, Gordon Brown, Tony Blair dan sejumlah tokoh lainnya. Kelompok *Vote Remain* percaya bahwa dengan memilih untuk tetap bergabung di Uni Eropa, maka rakyat Britania Raya akan hidup lebih baik, lebih aman dan lebih kuat (Gambar 2).



Gambar 2. Sejumlah poster yang disebarakan pada kampanye kelompok *Vote Remain* di Britania Raya

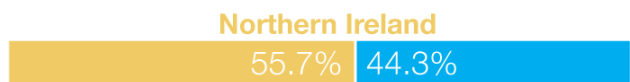
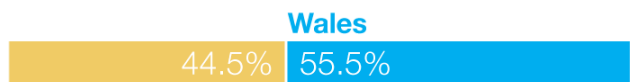
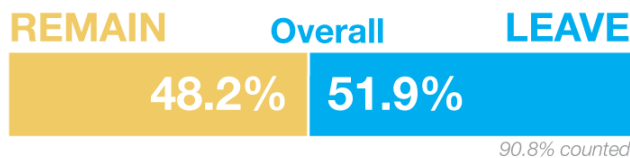
Perdebatan antara *voteleave* dan *voteremain* ini dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap suara masyarakat. *Statetment* partai buruh terhadap Brexit yang akan menghapus jutaan lapangan kerja di Britania Raya, dan dunia usaha akan menghadapi guncangan dan investasi akan berkurang di negara tersebut. *Statetment* partai konservatif terhadap Brexit menyatakan bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri jika masih menjadi anggota Uni Eropa dan wilayah Britania Raya akan terus didatangi para imigran. Britania Raya mulai menentukan masa depan untuk bertahan atau keluar di Uni Eropa (parstoday.com 2016).

## Referendum dan Kebijakan Akhir Brexit

Berdasarkan hasil perhitungan referendum brexit yang diadakan pada 23 Juni 2016 menyatakan bahwa masyarakat Britania Raya sebanyak 17.410.742 atau sekitar 51,98% memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (bbc.com 2016). Hal ini disebabkan karena banyak warga Britania Raya yang merasa bahwa Uni Eropa hanya menjadi beban bagi negaranya terutama mengenai biaya keanggotaan yang begitu mahal tetapi hasil yang didapat oleh Britania Raya tidak sepadan.

### Results of the British Referendum

The United Kingdom has voted to leave the European Union. Scotland and Northern Ireland voted to remain, but England and Wales elected to leave. Its departure may encourage other countries to reconsider their membership in the bloc.



Copyright Stratfor 2016 www.stratfor.com

Sumber: Stratfor 2016



*English voters are dragging Northern Ireland out of the EU.*

**SINN FEIN NATIONAL CHAIRMAN  
DECLAN KEARNEY**

*Scotland has delivered a strong, unequivocal vote to remain in the EU, and I welcome that endorsement of our European status.*

**SCOTTISH FIRST MINISTER  
NICOLA STURGEON**

Referendum ini dilakukan diseluruh wilayah Britania Raya yaitu di wilayah England, Wales, Scotland dan Northern Ireland. Dan pada hasil akhir referendum, menyatakan bahwa Britania Raya memutuskan memisahkan diri dari Uni Eropa. Sehari setelah pengumuman hasil perhitungan referendum BREXIT, *the British prime minister* David Cameron mengundurkan diri dari jabatannya karena David merasa gagal mengajak Britania Raya untuk tetap memilih bertahan di Uni Eropa dan digantikan oleh Theresa May pada 13 Juli 2016. Selanjutnya, Theresa May pada tanggal 28 Maret 2017 telah mengaktifkan Article 50 EU Lisbon Treaty dan menandatangani dokumen resmi mengenai proses pemisahan Britania Raya dari EU yang menjadi langkah awal BREXIT. Article 50 EU Lisbon Treaty merupakan sebuah pengumuman atau notifikasi resmi yang ditujukan kepada *European Council* bagi setiap Negara anggota Uni Eropa yang memutuskan untuk meninggalkan kesatuan dimana Negara tersebut memiliki proses negosiasi selama 2 tahun untuk mengakhiri keanggotaannya di Uni Eropa. Dengan penandatanganan dokumen resmi tersebut maka secara proses, BREXIT akan berlangsung selama 2 tahun dan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa secara hukum akan berlaku pada Maret 2019.

### **Kesimpulan**

Adanya isu imigrasi dan perekonomian Britania Raya membuat dinamika politik domestik ini membuat pemerintahan referendum yang disebut Brexit. Keadaan politik domestik Britania Raya yang mengajukan referendum untuk keluar dari Uni Eropa ini menimbulkan perdebatan antar kelompok kepentingan di Britania Raya yakni *Vote Leave* dan *Vote Remain*. Tujuan adanya referendum ini untuk masa depan Britania Raya, kubu *leave* yang mengaggap EU akan membuat negara ini tidak independent dalam mengatur negaranya dan ada permasalahan migran yang terlalu banyak di Britania Raya. Kubu *remain* jika Britania Raya meninggalkan EU akan berdampak pada suatu keadaan perekonomian yang membuat menghilang para investor asing dari Britania Raya.

Dengan demikian kubu-kubu yang menyuarakan suara-suara masa depan Britania Raya melakukan sebuah kampanye *vote leave* dan dari kubu *voter remain* ada kampanye lintas partai yang disebut *Britain Stronger in Europe*. Dan ini didukung oleh orang-orang yang duduk dipemerintahan, politikus dan pebisnis. Karena proses pemungutan suara ini akan dilaksanakan 23 Juni 2016. Proses referendum ini semakin menemukan titik akhir untuk keadaan masa depan Britania Raya. Dan hasil akhir menyatakan bahwa masyarakat Britania Raya sebanyak 17.410.742 atau sekitar 51,98% memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. (BBC, 2016). Ini menjadi kebangkitan Britania Raya yang baru.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Breuning, Marijke. 2007. "Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction". In *Domestic Constraints on Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Doerer, Fredrik. 2011. "International Constraints, Domestic Politics and Foreign Policy Change in Small States: The Fall Of The Danish 'Footnote Policy'". Stockholm: Pan-European IR Conference.

### **Website**

- Anon. 2016. Referendum Brexit tinggal 10 pekan Kampanye mulai bergerak. [www.erabaru.net/2016/04/16/referendum-brexit-tinggal-10-pekan-kampanye-mulai-bergerak/](http://www.erabaru.net/2016/04/16/referendum-brexit-tinggal-10-pekan-kampanye-mulai-bergerak/). (online). Diakses pada tanggal 22 April 2017
- Armitstead, Louise. 2013. "Rich, private school, Oxford. Meet John Mills, Labour's biggest donor". <http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/10310722/Rich-private-school-Oxford.-Meet-John-Mills-Labours-biggest-donor.html> (online). Diakses pada tanggal 19 April 2017.
- Arungbudoyo, Wikanto. 2016. Partai Buruh Inggris, Penguasa Singkat yang bertabur prestasi. <http://news.okezone.com/read/2016/05/01/18/1377190/partai-buruh-inggris-penguasa-singkat-yang-bertabur-prestasi?PageSpeed=noscript> (online) 22 April 2017.
- BBC News. 2015. EU Referendum: Lord Rose says it is 'patriotic' to remain in the EU. <http://www.bbc.com/news/uk-politics-34502343> (online).
- BBC. 2016. EU Referendum: Lord Lawson to Chair Vote Leave Campaign. <http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35487586#>(online). Diakses pada tanggal 25 April 2017
- BBC. 2016. "The battle to be the official EU referendum Leave campaign". <http://www.bbc.com/news/uk-politics-34484687> (online). Diakses pada tanggal 19 April 2017.
- BBC News. 2016. The people hoping to persuade UK to vote to stay in the EU. <http://www.bbc.co.uk/news/amp/34505076> (online).
- Berita Satu. 2016. Oposisi Partai Buruh Lawan Kampanye Brexit. <http://www.beritasatu.com/eropa/369347-oposisi-partai-buruh-lawan-kampanye-brexit.html> (online). Diakses pada tanggal 22 April 2017
- Biography Online. TT. Boris Johnson Biography. <http://www.biographyonline.net/politicians/boris-johnson.html> (online).
- DW. 2016. Penghitungan Awal: Inggris memutuskan keluar Uni Eropa. <http://www.dw.com/id/penghitungan-awal-inggris-memutuskan-keluar-uni-eropa-brexit/a-19347322>(online) 22 April 2017
- Early, Nick Robins. Brexit Wins As The UK Votes To Leave EU in Historic Referendum. [http://www.huffingtonpost.com/entry/brexit-results-referendum\\_us\\_576c37d5e4bof1683238e3d9](http://www.huffingtonpost.com/entry/brexit-results-referendum_us_576c37d5e4bof1683238e3d9)(online). Diakses pada tanggal 2 mei 2017.
- Erlanger, Steven. 2016. 'BREXIT': Explaining Britain's Vote on European Union Membership.

- <https://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/britain-european-union-brexit.html> (online). Diakses pada tanggal 2 Mei 2017
- Heffer, Greg. 2016. Boris Johnson-backed Vote Leave named lead Brexit campaign-but will EU vote to be DELAYED?. <http://www.express.co.uk/news/politics/660687/EU-referendum-Boris-Johnson-Vote-Leave-lead-Brexit-campaign-Electoral-Commission> (online). Diakses pada tanggal 25 April 2017.
- Horan, Blair. 2016. Brexit and Free Movement of People. Ireland. [http://www.iiea.com/ftp/Publications/2016/IIEA\\_Brexit\\_and\\_Free\\_Movement\\_of\\_People.pdf](http://www.iiea.com/ftp/Publications/2016/IIEA_Brexit_and_Free_Movement_of_People.pdf) (online). Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.
- IMF. 2016. United Kingdom Selected Issues. Washington D.C: Publication Services. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16169.pdf> (online). Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.
- Iyengar, Rishi. 2016. These 3 Facts Explain Why The U.K Held The 'BREXIT' Referendum. <http://time.com/4381184/uk-brexit-european-union-referendum-cameron/> (online). Diakses pada tanggal 2 Mei 2017.
- Lukman, Agus. 2016. Brexit, Penentuan Nasib Inggris atau Nasib Uni Eropa?. [http://kbr.id/terkini/06-2016/brexit\\_penentuan\\_nasib\\_Britania%20Raya\\_atau\\_nasib\\_uni\\_ero\\_pa\\_/82409.html](http://kbr.id/terkini/06-2016/brexit_penentuan_nasib_Britania%20Raya_atau_nasib_uni_ero_pa_/82409.html)(online). Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- Maulana Irvan. 2016. Partai Buruh Inggris dalam pergolakan atas hasil pemilihan Brexit. (online). Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- McCann, Kate. 2016. Lord Lawson announced as chairman of Vote Leave as controversial figures are dropped from the board. <http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12138985/Lord-Nigel-Lawson-announced-as-chairman-of-Vote-Leave-as-controversial-figures-are-dropped-from-the-board.html> (online). Diakses pada tanggal 25 April 2017.
- Pars Today. 2016. Perdebatan Pro-Kontra Seputar Brexit. [http://parstoday.com/id/radio/world-i11893-perdebatan\\_pro\\_kontra\\_seputar\\_brexit](http://parstoday.com/id/radio/world-i11893-perdebatan_pro_kontra_seputar_brexit)(online). Diakses pada tanggal 23 April 2017.
- Reuters. 2015. "Businesses, MPs launch 'Vote Leave' campaign to push for Brexit". <http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-poll-idUKKCNOs22V820151008> (online). Diakses pada tanggal 19 April 2017.
- Suara Merdeka. 2017. Brexit Menuju ke Parlemen, Apa yang akan terjadi selanjutnya?. <http://berita.suaramerdeka.com/bisnis/brexit-menuju-ke-parlemen-apa-yang-akan-terjadi-selanjutnya/> (online). Diakses pada tanggal 22 April 2017.
- Sky News. 2016. Ex-Chancellor Lord Lawson To Lead 'Vote Leave'. <http://news.sky.com/story/ex-chancellor-lord-lawson-to-lead-vote-leave-10154660> (online). Diakses pada tanggal 25 April 2017.
- The Economist. 2013. From Referendum to renegotiation. <http://www.economist.com/blogs/blighty/2013/07/david-cameron-and-europe> (online).
- The Guardian. 2015. "Millionaire donors and business leaders back Vote Leave campaign to exit EU". <https://www.theguardian.com/politics/2015/oct/09/millionaire-donors-back-cross-party-campaign-to-leave-eu> (online). Diakses pada tanggal 19 April 2017.
- Watt, Nicholas. 2016. Boris Johnson to Campaign for Brexit in EU referendum. <https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/21/boris-johnson-eu>

referendum-campaign-for-brexit-david-cameron (online). Diakses pada tanggal 25 April 2017.

Yustinus Andri DP. 2016. Bola Salju Isu Brexit. <http://jakarta.bisnis.com/read/20160617/434/558688/bola-salju-isu-brexit-> (online). Diakses pada tanggal 25 April 2017